

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi. Hal ini dikarenakan letak geografisnya yang terletak di antara Benua Asia dan Australia serta berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, ditambah dengan kondisi geologis yang berada pada jalur pegunungan aktif dan beriklim tropis. Kondisi tersebut menjadikan Sumatera Barat rentan terhadap berbagai bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, tsunami, tanah longsor, dan letusan gunung berapi. Bencana yang melanda Sumatera Barat ini kerap menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik dari segi korban jiwa maupun kerugian materi.<sup>1</sup>

Bencana alam memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama pada aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan. Salah satu dampak yang paling nyata adalah melumpuhkan perekonomian serta kerusakan infrastruktur seperti perumahan, jalan, lahan pertanian, sekolah, dan fasilitas umum lainnya.<sup>2</sup> Bencana alam yang terjadi pada tahun 2023 hingga tahun 2024 di Sumatera Barat, berupa erupsi Gunung Marapi dan banjir lahar dingin memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Bencana tersebut

---

<sup>1</sup> Novianto Budi Kurniawan. 2020. Desain dan Implementasi Data Warehouse Provinsi Sumatera Barat. *Academia.Edu*. hlm. 1-16.

<sup>2</sup> Decky Dwi Utomo dan Fitri Yul Dewi Marta. 2022. Dampak Bencana Alam Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*. 2(1) ; 92-97.

menjadi salah satu bencana terbesar dalam beberapa tahun terakhir, karena dampak yang diberikan tidak hanya menimbulkan banyak korban jiwa, tetapi juga pada kerusakan rumah dan lahan pertanian masyarakat.

Bencana alam membawa dampak yang luas terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Dari segi kesehatan masyarakat, kondisi lingkungan pengungsian yang tidak higienis sering kali memicu penyebaran penyakit seperti diare, infeksi kulit, infeksi saluran pernapasan, serta menimbulkan trauma psikologis akibat kehilangan anggota keluarga maupun harta benda. Di samping itu, dampak ekonomi yang ditimbulkan juga sangat signifikan, khususnya di wilayah yang bergantung pada sektor pertanian. Dengan demikian, diperlukan upaya komprehensif dari pemerintah di daerah setempat untuk membantu pemulihan dan perbaikan kondisi masyarakat terdampak.

Dalam penanggulangan bencana, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana melalui berbagai langkah strategis. Tanggung jawab tersebut mencakup penetapan kebijakan penanggulangan bencana, pemberian perlindungan kepada masyarakat, memastikan semua pemenuhan hak-hak korban bencana, melakukan pemulihan pasca bencana, pengalokasian dana bencana alam dan mengintegrasikan pengurangan resiko bencana.<sup>3</sup> Semua upaya tersebut harus dilakukan secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan sesuai prinsip penanggulangan bencana.

Pemerintah Kabupaten Agam dalam upaya meningkatkan penanggulangan bencana telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

2016 tentang Penanggulangan Bencana. Peraturan daerah tersebut bertujuan memberikan landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Substansi peraturan daerah ini mencakup tiga tahapan penanggulangan, yaitu prabencana, keadaan darurat, dan pasca bencana.<sup>4</sup> Implementasi peraturan daerah tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, mengurangi dampak bencana, dan mempercepat proses pemulihan pascabencana.

Implementasi merupakan serangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi merupakan tahapan krusial dalam mewujudkan suatu rencana, kebijakan, atau ide menjadi tindakan nyata.<sup>5</sup> Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan, antara lain ketersediaan sumber daya yang memadai, baik dari segi finansial maupun manusia. Komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat untuk memastikan informasi tersampaikan dengan jelas dan kesalahpahaman dapat dihindari, serta koordinasi yang baik antarunit memastikan semua bagian memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang jelas agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan optimal dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Agam 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana.

<sup>5</sup> Indra Kristian. 2023. Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*. 21(2) ; 88-98.

mengelola risiko dan dampak bencana di wilayahnya. Kewenangan tersebut mencakup penetapan kebijakan penanggulangan bencana, penyusunan perencanaan pembangunan, penentuan status darurat, pelaksanaan kerja sama dengan daerah lain dalam mendukung penanganan bencana yang efektif, penggerahan seluruh sumber daya yang tersedia, serta perumusan kebijakan terkait pengelolaan bantuan.<sup>6</sup> Penanggulangan bencana menuntut adanya koordinasi yang erat antara pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pemerintah nagari guna memastikan seluruh upaya penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara efektif.

Bencana alam yang terjadi di Kecamatan Sungai Pua pada tahun 2023 hingga tahun 2024, berupa erupsi Gunung Marapi dan banjir lahar dingin, memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat setempat sehingga membutuhkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan bencana dalam rangka mengurangi risiko bencana. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana di Kecamatan Sungai Pua, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, yang mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 indikator utama, yaitu (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur Birokrasi.<sup>7</sup>

Penelitian terdahulu mengenai penanggulangan bencana oleh pemerintah telah banyak dilakukan beberapa peneliti sebelumnya. Beberapa diantaranya adalah

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2016. *Loc.cit.*

<sup>7</sup> Joko Pramono. S.Sos., M. S. 2020. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Unisri Press. Surakarta. hlm. 4-5.

penelitian yang dilakukan oleh, Pahlepi,<sup>8</sup> Aulia dan Meiwanda,<sup>9</sup> Syarifah, dkk,<sup>10</sup> Rachmawati dan Choiriyah.<sup>11</sup> Pada penelitian tedahulu pada umumnya membahas pelaksanaan penanggulangan bencana oleh pemerintah daerah, khususnya BPBD melalui aspek peranan, strategi, kapabilitas, dan kinerja. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana di Kecamatan Sungai Pua, khususnya dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada fase keadaan darurat dan fase pemulihan pascabencana, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran partisipasi masyarakat yang turut mendukung implementasi kebijakan dengan berlandaskan pada teori implementasi kebijakan.

Penelitian ini hadir untuk mengkaji sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana tersebut telah dijalankan secara optimal oleh pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana erupsi gunung berapi dan banjir lahar dingin. Penelitian ini berfokus pada tindakan pemerintah dalam menanggulangi dampak bencana terhadap kerugian dan kerusakan yang dialami masyarakat, serta kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanannya.

<sup>8</sup> M R Pahlepi. 2021. Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 dalam Rangka Kinerja Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik*. 1(4) ; 1-8.

<sup>9</sup> Chyntia Aulia dan Geovani Meiwanda. 2022. Strategi Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kota Solok Sumatera Barat. *Journal of Research and Development on Public Policy*. 1(3); 35-44.

<sup>10</sup> Hani, Syarifah, dkk. 2022. Kapabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 7(2) ; 398-407.

<sup>11</sup> F Rahcmawati dan I U Choiriyah. 2024. Strategi Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*. 6(1) ; 51-62.

## 1.2 Rumusan Masalah

Kecamatan Sungai Pua terletak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dengan luas wilayah 37,83 kilometer persegi yang terdiri dari 5 nagari, yaitu Batu Palano, Padang Laweh, Batagak, Sariak, dan Sungai Pua.<sup>12</sup> Kecamatan Sungai Pua memiliki jumlah penduduk mencapai 27.813 jiwa, terdiri dari 14.102 laki-laki dan 13.711 perempuan dengan total 8.024 kartu keluarga (KK). Kecamatan ini berada di kawasan pegunungan, tepatnya di kaki Gunung Marapi dan Gunung Singgalang, sehingga memiliki kesuburan tanah yang tinggi dan sangat berpotensi untuk pengembangan aktivitas pertanian.<sup>13</sup>

Kecamatan Sungai Pua sebagai wilayah yang berada di sekitar Gunung Marapi, memiliki kerentanan terhadap bencana alam seperti erupsi dan banjir lahar dingin. Pada tanggal 3 Desember 2023 hingga tahun 2024, wilayah ini terdampak langsung oleh erupsi Gunung Marapi dan banjir lahar dingin yang menerjang tiga nagari di Kecamatan Sungai Pua, menyebabkan hujan abu vulkanik yang memperburuk kondisi lahan pertanian dan mengganggu aktivitas masyarakat. Bencana erupsi Gunung Marapi memberikan dampak yang sangat besar pada sektor pertanian dimana terdapat 477,87 hektar lahan pertanian terdampak abu vulkanik dengan kerugian mencapai Rp.2,4 miliar.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam. 2024. *Kecamatan Sungai Pua Dalam Angka*. BPS. Agam. hlm. 9-10.

<sup>13</sup> Buku Data Agregat Kependudukan Kabupaten Agam Semester II Tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024. hlm. 69.

<sup>14</sup> Sumatera.bisnis.com. 2024. Petani di Lereng Gunung Marapi Wilayah Merugi Rp. 2,4 Miliar Akibat Abu Vulkanik. Diakses pada Sumatera.bisnis.com melalui <https://shorturl.at/EmxAG> pada 8 Maret 2025.

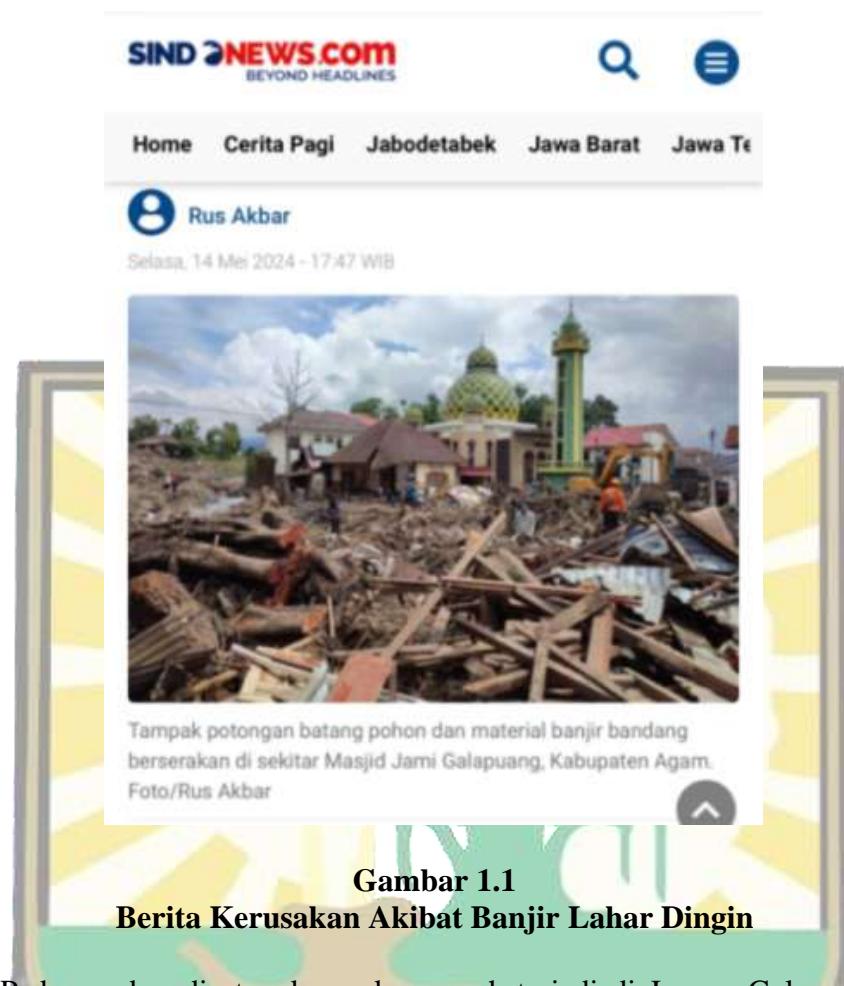
**Tabel 1.1**  
**Data Luas Lahan Pertanian yang Terdampak**

No.	Kecamatan	Luas Lahan
1.	Kecamatan Canduang	206 ha
2.	<b>Kecamatan Sungai Pua</b>	<b>233,87 ha</b>
3.	Kecamatan Baso	38 ha
	<b>Total</b>	<b>477,87 ha</b>

Sumber: data sekunder, diolah oleh peneliti pada tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, Kecamatan Sungai Pua merupakan wilayah yang paling terdampak erupsi Gunung Marapi, dengan luas kerusakan lahan pertanian mencapai 233,87 hektar. Hujan abu vulkanik yang terjadi secara terus menerus sejak awal erupsi menyebabkan kerusakan pada tanaman, mulai dari kerusakan ringan hingga berujung pada gagal panen. Hal ini dipengaruhi oleh letak geografis Kecamatan Sungai Pua yang memiliki jarak cukup dekat dengan Gunung Marapi, sehingga menjadikan daerah ini rentan terhadap dampak erupsi.

Selain itu, curah hujan yang tinggi juga memicu terjadinya banjir lahar dingin yang membawa material vulkanik dari puncak gunung, menimbulkan kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, lahan pertanian, hingga bangunan rumah yang mengancam pemukiman masyarakat. Banjir lahar dingin yang terjadi pada tahun 2024 bahkan menimbulkan korban jiwa, merusak lahan pertanian, dan menghancurkan beberapa rumah masyarakat di Kecamatan Sungai Pua. Bencana tersebut terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi yang mengakibatkan material vulkanik yang menumpuk di puncak gunung terbawa aliran air dan menerjang kawasan pemukiman masyarakat.



**Gambar 1.1**  
**Berita Kerusakan Akibat Banjir Lahar Dingin**

Pada gambar di atas, kerusakan parah terjadi di Jorong Galuang, Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, yang diakibatkan oleh terjangan banjir lahar dingin yang membawa lumpur, batu-batu besar, serta bongkahan kayu. Peristiwa tersebut mengakibatkan kerusakan berat pada rumah masyarakat, jaringan listrik, jalan, dan berbagai fasilitas umum lainnya, serta menimbulkan korban jiwa sebanyak 6 orang yang telah ditemukan meninggal dunia.<sup>15</sup> Dengan kondisi ini, menegaskan perlunya perhatian yang serius dari pemerintah untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana.

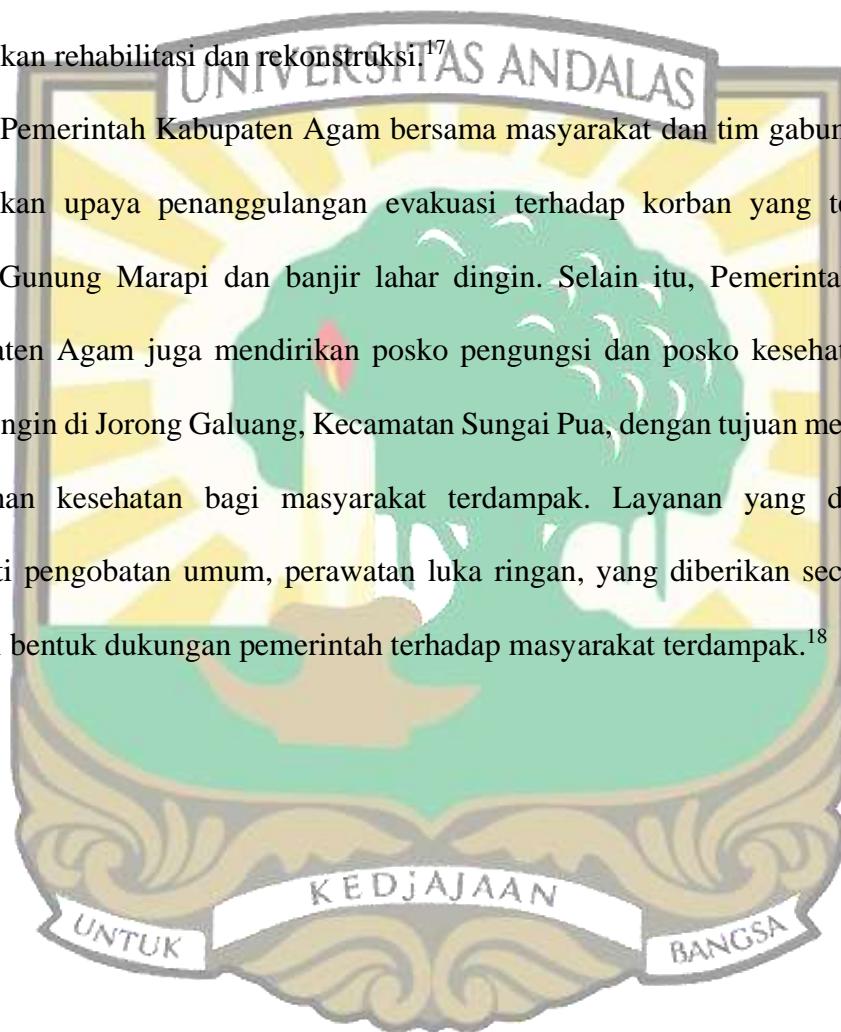
<sup>15</sup> Adjuma Gustijah. 2024. Banjir Lahar Dingin di Jorong Galuang, Nagari Sungai Pua, Merenggut Korban Jiwa. Diakses pada Menarainfo.com melalui <https://shorturl.at/iVRsg> pada 8 Maret 2025.

Selain Jorong Galuang, wilayah lain di Kecamatan Sungai Pua yang terdampak banjir lahar dingin adalah Jorong Kapalo Koto, Nagari Sungai Pua yang mengakibatkan 4 rumah hancur, 9 rumah rusak berat, dan terdapat 5 orang korban jiwa. Selain itu, banjir juga melanda Nagari Batu Palano yang merendam beberapa rumah masyarakat. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi dampaknya memberikan kerugian material dan meningkatkan rasa kekhawatiran masyarakat.<sup>16</sup> Dengan demikian, kerusakan yang ditimbulkan akibat erupsi Gunung Marapi dan banjir lahar dingin tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Sungai Pua memiliki kerentanan yang tinggi terhadap bencana alam, sehingga diperlukan upaya penanggulangan dan pemulihan yang lebih efektif dari pemerintah untuk melindungi masyarakat, mengurangi risiko bencana di masa mendatang, dan mempercepat proses pemulihan bagi masyarakat terdampak.

Berdasarkan Pasal 28 hingga Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana, telah mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya penanggulangan bencana pada tahap keadaan darurat dan pemulihan pascabencana. Upaya tersebut meliputi siaga darurat, berupa evakuasi korban, penyelamatan harta benda, penyediaan sumber daya kebutuhan mendesak, mobilisasi relawan, dan perngurusan pengungsi. Pada tahap tanggap darurat, pemerintah berkewajiban menetapkan status tanggap darurat, melakukan pengkajian cepat terhadap lokasi, tingkat kerusakan, dan ketersediaan sumber daya, evakuasi korban, pelayanan kesehatan, serta mengatur persediaan bantuan, transportasi dan logistik

<sup>16</sup> Kaba12.co.id. 2024. Dampak Banjir Bandang di Sungai Pua, Masjid Jami' Galuang Alami Kerusakan Serius. Diakses pada Kaba12.co.id melalui <https://shorturl.at/Z5du0> pada 8 Maret 2025.

penanggulangan. Selanjutnya, pada tahap transisi darurat bencana ke pemulihan, pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan tempat hunian, memulihkan sarana dan prasarana, biaya penggantian lahan, bangunan, dan tanaman masyarakat. Terakhir, pada tahap pascabencana pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.<sup>17</sup>



Pemerintah Kabupaten Agam bersama masyarakat dan tim gabungan telah melakukan upaya penanggulangan evakuasi terhadap korban yang terdampak erupsi Gunung Marapi dan banjir lahar dingin. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Agam juga mendirikan posko pengungsian dan posko kesehatan banjir lahar dingin di Jorong Galuang, Kecamatan Sungai Pua, dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Layanan yang disediakan meliputi pengobatan umum, perawatan luka ringan, yang diberikan secara gratis sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap masyarakat terdampak.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana. *Loc.cit.*

<sup>18</sup> Antaranews.com. 2024. Pemkab Agam Dirikan Tiga Posko Kesehatan di Lokasi Banjir Lahar Marapi. Diakses pada Antaranews.com melalui <https://shorturl.at/zpKP8> pada 9 Maret 2025.



**Gambar 1.2  
Berita Bantuan untuk Korban Banjir Lahar Dingin**

Pada gambar di atas, terlihat adanya bantuan bagi korban bencana banjir lahar dingin yang disalurkan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) dan masyarakat Bukittinggi-Agam. Bantuan tersebut berupa kebutuhan sandang dan pangan yang dibutuhkan masyarakat korban bencana banjir lahar dingin. Bantuan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak, seperti makanan, pakaian, dan perlengkapan sehari-hari.<sup>19</sup>

Pemerintah Kecamatan Sungai Pua juga telah melakukan upaya pembersihan material vulkanik yang menimbulkan lahan pertanian masyarakat akibat

<sup>19</sup> Adjurama Gustijah. 2024. Bantuan Untuk Korban Bencana Banjir Lahar Dingin di Jorong Galuang Mulai Berdatangan. Diakses pada Menarainfo.com melalui <https://shorturl.at/wQ5yt>. pada 9 Maret 2025.

banjir lahar dingin Gunung Marapi. Sebagai tindak lanjut, masyarakat yang lahan pertaniannya terdampak banjir lahar dingin menerima bantuan dana sebesar Rp. 1.000.000,00 per lahan yang dialokasikan sebagai Hari Orang Kerja (HOK). Bantuan tersebut disalurkan secara langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam melalui kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jemari Sakato.<sup>20</sup>

Akan tetapi, bantuan tersebut baru mencakup lahan pertanian yang terdampak banjir lahar dingin dan belum menjangkau lahan yang terdampak abu vulkanik. Padahal, dampak abu vulkanik memiliki cakupan yang sangat luas dan hampir merata pada seuruhan lahan pertanian di Kecamatan Sungai Pua. Temuan ini menunjukkan penyaluran bantuan belum merata kepada seluruh masyarakat terdampak di Kecamatan Sungai Pua. Hal tersebut mengindikasikan adanya kendala dalam mekanisme koordinasi antar tingkatan pemerintahan, yang berdampak pada kurang optimalnya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, upaya penanggulangan bencana di Kecamatan Sungai Pua menjadi kurang efektif.

Masyarakat yang terdampak abu vulkanik di Kecamatan Sungai Pua juga mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah terkait kerugian hasil pertanian yang dialami akibat erupsi Gunung Marapi yang berlangsung dalam jangka waktu lama. Bantuan berupa modal usaha dan sarana penunjang pertanian, seperti benih, pupuk, pestisida, sangat dibutuhkan agar petani dapat melanjutkan kembali aktivitas pertaniannya dan memperoleh pendapatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan keluarga sebagaimana kondisi sebelum terjadinya bencana.

---

<sup>20</sup> Ahmad Ikhsan. 2024. Lahan Pertanian Warga Kecamatan Sungai Pua Terdampak Material Banjir Lahar Dingin. Diakses pada Rri.co.id melalui <https://shorturl.at/FBeve> pada 9 Maret 2025.



*Sumber: data dari Pemerintah Nagari Batu Palano*

### Gambar 1.3 Pemerintah Nagari Batu Palano Menyalurkan Bantuan Pupuk

Pada gambar diatas, terdapat penyaluran bantuan yang dilakukan oleh salah satu Pemerintah Nagari di Kecamatan Sungai Pua yaitu Nagari Batu Palano, sebagai bentuk dukungan dari pemerintah melalui pemberian bantuan pupuk kepada petani. Bantuan tersebut bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan produktivitas pertanian yang terdampak erupsi Gunung Marapi. Dengan adanya bantuan pupuk ini, diharapkan petani dapat memperbaiki kualitas tanah dan hasil panen, agar pendapatan petani dapat pulih kembali.<sup>21</sup>

Meskipun pemerintah nagari di wilayah terdampak telah berupaya mengatasi situasi tersebut, bantuan yang diberikan masih terbatas dan belum

---

<sup>21</sup> Pemerintah Nagari Batu Palano. Penyaluran Bantuan Pupuk Kepada Masyarakat. Pada tanggal 24 September 2024 pukul 10.28 WIB.

sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian yang dilakukan pada bulan Maret 2025, peneliti menemukan bahwa pemerintah daerah hanya mampu menyalurkan bantuan secara terbatas, seperti pemberian pupuk yang hanya dilakukan satu kali kepada petani yang terdampak abu vulkanik, serta bantuan Hari Orang Kerja (HOK) sebesar Rp 1 juta per lahan yang hanya mencakup sebagian kecil lahan terdampak banjir lahar dingin. Selain itu, pada saat pra penelitian peneliti juga menemukan bahwa pendataan kerugian dan kerusakan masyarakat belum dilakukan secara seragam antar nagari, lebih dari 50% masyarakat terdampak tidak mendapatkan pendataan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam pendistribusian bantuan.

Berdasarkan data awal yang diperoleh, peneliti berasumsi bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana di Kecamatan Sungai Pua belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan sumber daya finansial yang tersedia dan rendahnya kinerja birokrasi serta kurang efektifnya koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana. Oleh karena itu, pertanyaan pada penelitian kali ini ialah “Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana di Kecamatan Sungai Pua?”

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2016 di Kecamatan Sungai Pua.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menambah pustaka di bidang ilmu politik terkhususnya implementasi peraturan daerah tentang penanggulangan bencana dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan mengenai implementasi peraturan daerah serta dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu untuk meningkatkan wawasan baru bagi masyarakat dan peneliti selanjutnya.

